

---

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR****EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) PROGRAM POLICY IN THE COASTAL AREA OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY**

---

**Tiny Sukmawaty  
Burnama\***

\* Ilmu Administrasi Bidang  
Minat Administrasi Publik,  
Kotawaringin Timur,  
Kalimantan Tengah,  
Indonesia

\*email:  
bithaburnama@gmail.com

**Abstrak**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Salah satu program penanganan kemiskinan adalah KUBE yang terlaksana di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Evaluasi dilakukan sebagai alat untuk mengetahui, sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan memberikan perubahan dalam taraf kehidupan masyarakat miskin di wilayah pesisir. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis efektifitas; efisiensi; kecukupan; perataan; responsivitas dan ketepatan Program KUBE. Informan penelitian berjumlah 13 (tiga belas) orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dokumentasi dilengkapi dengan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif berupa reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus yang memberikan gambaran tentang kehidupan sebenarnya dari implementasi program KUBE di wilayah pesisir untuk kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: efektifitas, program KUBE untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dapat dicapai dengan cukup baik, namun untuk terlaksananya program yang dijalankan secara gotong royong atau kelompok tidak dapat diimplementasikan; efisiensi, program KUBE dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.; kecukupan, dana yang diterima dapat memenuhi kebutuhan peralatan kerja dengan kondisi lebih baik; perataan, Setiap anggota kelompok mendapatkan peralatan kerja baru sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; responsivitas, bantuan dana untuk pengembangan usaha melalui program KUBE yang digunakan untuk meremajakan peralatan kerja penerima bantuan.; ketepatan, penerima program KUBE adalah masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**Kata Kunci:**

Evaluasi  
Kemiskinan  
KUBE

**Keywords:**

Evaluation  
Poverty  
KUBE

**Abstract**

*Poverty is an issue that requires attention and intervention. One of the poverty alleviation programs is the Joint Business Group Program (KUBE) implemented in the coastal areas of East Kotawaringin District. Evaluation is conducted to determine the extent to which the implemented policies bring about changes in the living standards of the impoverished communities. This research aims to describe and analyze the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the KUBE Program. The study involved thirteen informants. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis utilized an interactive analysis model involving data reduction, presentation, and conclusion drawing. This qualitative study employed a case study approach to provide insights into the actual implementation of the KUBE program for evaluation using evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research findings indicate that: effectiveness, the KUBE program has been successful in improving the living standards of its members, although the implementation of the program through collective or group efforts was not feasible; efficiency, the KUBE program adheres to applicable regulations; adequacy, the received funds can fulfill the equipment needs for work in better conditions; equity, each group member receives new work equipment according to their respective needs; responsiveness, the fund assistance for business development through the KUBE program is utilized to rejuvenate the work equipment of aid recipients; accuracy, the recipients of the KUBE program are individuals listed in the Integrated Social Welfare Data (DTKS).*



## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok negara berkembang yang berhubungan dengan masalah sosial dan berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan, biasanya terjadi disegala bidang baik sosial maupun ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana amanat negara memiliki peran penting untuk menjalankan kewajibannya dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakatnya. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari terlaksananya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penanganan fakir miskin melalui pemberdayaan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menuliskan bahwa KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan dari dibentuknya KUBE adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Anggota KUBE berjumlah paling sedikit lima orang dan paling banyak lima belas orang, namun pada umumnya KUBE berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari satu orang ketua kelompok, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan tujuh orang anggota. Pembentukan KUBE di wilayah pesisir disebut dengan KUBE pesisir. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pesisir merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Program KUBE pesisir dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Pada tahapan pelaksanaannya Kementerian Sosial menyalurkan bantuan dana KUBE melalui rekening kelompok masing-masing. Rekening KUBE sudah disiapkan secara kolektif oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga anggota KUBE tidak dibebani dengan setoran pertama seperti pembukaan rekening pada umumnya. Pemberian bantuan dana ini memberikan peluang kepada anggota KUBE untuk mengembangkan dan meningkatkan produktifitas usaha kelompoknya. Selain bantuan dana tersebut, anggota KUBE juga berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas produksi KUBEnya melalui pendampingan oleh pendamping

KUBE yang akan direkrut oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten.

Permasalahan yang umumnya muncul menurut wawancara dengan pendamping sosial UEP KUBE adalah kesulitan anggota kelompok dalam menyesuaikan diri untuk bekerjasama. Selain itu perlengkapan administrasi yang sudah disiapkan seperti buku tamu dan buku iuran kesejahteraan sosial sering terlupa untuk dikerjakan. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Wilayah Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus pada Desa Serambut dan Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut).

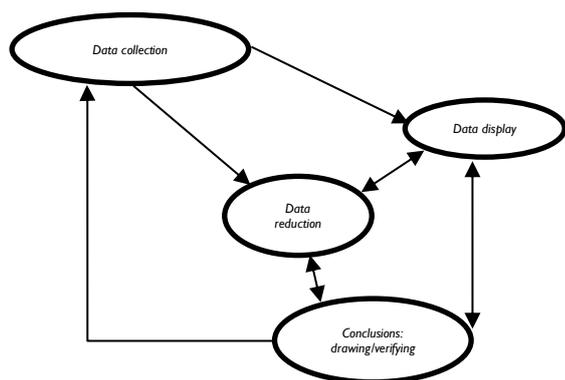
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan program KUBE di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Stufflebeam dan Shinkfield (dalam Ananda dan Rafidha, 2017: 1-2) memaparkan bahwa evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif; mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai signifikansi; kejujuran dalam rangka memandu pengambilan keputusan akuntabilitas, dukungan, menyebarkan praktek-praktek yang efektif serta meningkatkan pemahaman tentang fenomenan-fenomena yang terlibat. Penelitian evaluatif pada dasarnya adalah penelitian terapan, akan tetapi tujuannya berbeda. Danim (dalam Yuniarti dkk, 2021: 74) penelitian evaluatif ini ditujukan untuk mengukur keberhasilan suatu program/rencana, produk atau aktivitas tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi keberhasilan manfaat, kegunaan, kelayakan dan sumbangan suatu program/rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/Lembaga tertentu. Penelitian evaluatif dapat dirancang untuk menjawab pertanyaan, menguji atau membuktikan hipotesis.

Subjek penelitian adalah 10 (sepuluh) orang anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Desa Serambut dan Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut. Parameter subjek penelitian adalah: mengetahui tentang berhasil atau tidak berhasilnya program KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur.

Model analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Gunawan, 2017:211).



Gambar 1  
Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman dalam Gunawan, 2017:211)

Ketiga tahapan analisis data kualitatif ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung (Gunawan, 2017:212).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil penelitian

#### 1. Efektifitas

##### 1.1. Tercapainya tujuan dalam peningkatan pendapatan anggota KUBE

Setiap informan penelitian mengakui jika program KUBE sangat membantu kegiatan usaha anggota KUBE sebagai penerima manfaat.

##### 1.2. Terlaksananya prinsip gotong royong

Tahap pelaksanaan prinsip gotong royong ini adalah tahap tersulit untuk direalisasikan. Seluruh anggota KUBE menolak bekerja dalam satu kelompok dengan alasan tidak memiliki kemampuan bekerjasama dan karena alat kerja yang diberikan sudah dimiliki masing-masing anggota kelompok sehingga meskipun tidak secara kelompok, kegiatan usaha dan pekerjaan masih dapat dilaksanakan secara individu. Alasan lain yang dikemukakan oleh penerima manfaat adalah mengkhawatirkan terjadinya konflik yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antar tetangga sesama penerima manfaat. Pihak Dinas Sosial juga mengakui menemui kesulitan untuk melakukan penegasan karena setiap anggota KUBE tidak mempermasalahkan jika harus bekerja sendiri, karena nilai bantuan yang didapat sama nilainya meskipun dalam bentuk barang. Barang yang dibeli setiap anggota kelompok sudah mencukupi untuk meneruskan jalannya usaha masing-masing, sehingga anggota kelompok tidak merasa bersalah meskipun harus melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri.

#### 2. Efisiensi

Berbagai usaha sudah dilakukan seperti sosialisasi dan informasi berulang setiap bulannya pada saat pertemuan kelompok akan tetapi setiap penerima KUBE sudah menentukan pilihan untuk menjalankan usaha secara mandiri. Peralatan yang diberikan sesuai

dengan kebutuhan setiap individu juga memberikan kemudahan untuk penerima manfaat dalam melaksanakan usahanya secara sendiri-sendiri. Pendamping sosial sudah mengkomunikasikan kepada pihak penanggung jawab program dan tidak menemukan jalan keluar karena tidak ada hukuman kepada penerima manfaat jika tidak menjalankan program sesuai aturan yang berlaku.

#### 3. Kecukupan

Kecukupan merupakan kriteria yang memberikan penjelasan mengenai seberapa jauh hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Informan penelitian mengakui bahwa dana yang diberikan cukup untuk membeli peralatan yang mereka butuhkan, nilai dana yang didapat tidak terlalu dipermasalahkan karena sudah mengusulkan alat kerja yang dibutuhkan dan berkualitas baik dibandingkan sebelumnya sesuai dengan nilai dana yang ada.

#### 4. Perataan

Dana bantuan diberikan secara merata kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Harga barang diusahakan sama meskipun jenis barang berbeda, jika harga barang berbeda maka dilakukan musyawarah untuk titik temu agar semua kebutuhan masing-masing anggota kelompok dapat terpenuhi. Pemilihan barang dilakukan berdasarkan usulan setiap anggota KUBE sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

#### 5. Responsivitas

Berdasarkan pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulannya yang dilaporkan oleh pendamping sosial kepada penanggung jawab program diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan motivasi kerja setiap penerima manfaat. Hal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa program ini sudah cukup tepat untuk digunakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan.

#### 6. Ketepatan

Informan dari penanggung jawab program dan pendamping sosial menjelaskan bahwa program KUBE ini sudah cukup tepat untuk digunakan di wilayah pesisir sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan karena setiap penerima manfaat mengakui adanya peningkatan pendapatan. Pelaksanaan program yang diwajibkan secara berkelompok masih perlu diteliti kembali, karena yang sebenarnya terjadi penerima manfaat melaksanakan pekerjaannya secara individu. Pendampingan dan pertemuan rutin yang dilakukan oleh pendamping sosial juga menemukan kendala karena tidak semua anggota dapat hadir di waktu pertemuan yang sudah dijadwalkan disebabkan oleh waktu kerja anggota kelompok yang juga tidak terjadwal.

#### b. Pembahasan

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif. Aktivitas positif tersebut dapat berbentuk kegiatan pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan, dan kegiatan lainnya. Adanya kelompok atau organisasi masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dalam berbagai bidang. Wahyu (dalam Paulu, 2022: 176) menegaskan bahwa tujuan akhir dari adanya KUBE adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial keluarga. Pernyataan yang

tertulis pada penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yang menemukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan setiap anggota KUBE setelah diberikan bantuan dana hibah melalui program KUBE. Temuan lain memberikan penjelasan bahwa peralatan kerja yang dibeli dengan bantuan dana hibah tersebut memberikan motivasi kerja yang baik kepada anggota KUBE sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan hasil kerja dan kesejahteraan hidup anggotanya.

Evaluasi merupakan suatu gabungan antara interpretasi dan penilaian. William N. Dunn (dalam Yanti, 2022:69) menjelaskan tentang enam kriteria yang biasa digunakan dalam penelitian mengenai evaluasi program dan kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kriteria tersebut yang dapat diungkapkan dalam penelitian kali ini, berikut penjelasannya:

#### 1. Efektifitas

1.1. Tercapainya tujuan dalam peningkatan pendapatan, KUBE sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan anggotanya agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Program KUBE yang dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur diakui setiap anggotanya mampu meningkatkan pendapatan harian. Setiap anggota KUBE mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari lebih baik dibandingkan dengan sebelum menjadi anggota KUBE. Anggota KUBE mengakui sangat terbantu dengan adanya modal usaha yang dibagikan dengan metode hibah, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang sudah diberikan. Kebebasan memilih jenis usaha dan menentukan pilihan barang yang akan dibelanjakan juga merupakan kemudahan lain yang dianggap sebagai bentuk perhatian yang luar biasa dari Pemerintah untuk penerima manfaat.

1.2. Terlaksananya prinsip gotong royong, KUBE adalah program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok. KUBE yang dijalankan di wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur ini diakui setiap anggotanya tidak dapat dilakukan secara kelompok karena kesulitan mengatur waktu dan tidak ada pengalaman bekerja dalam satu tim atau kelompok. Hambatan utama pelaksanaan program kali ini adalah usaha yang tidak dijalankan secara berkelompok, keuntungan dikelola sendiri-sendiri sehingga besaran keuntungan setiap anggota berbeda-beda tergantung dengan jalannya usaha yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari terlaksananya program KUBE yang ingin meningkatkan prinsip gotong royong dalam kegiatan mengumpulkan dana masyarakat melalui luran Kesejahteraan Sosial (IKS) tidak terlaksana. Anggota KUBE memilih menjalankan usahanya secara mandiri sehingga tidak ada pembagian keuntungan, menyisihkan keuntungan guna kepentingan kelompok bahkan mengembangkan kemampuan berkoperasi tidak

dapat dilaksanakan dengan alasan ketidakmampuan setiap anggota KUBE untuk bekerja dalam kelompok. Pihak Dinas Sosial dan juga pendamping sosial mengakui kesulitan untuk bertindak tegas dalam penerapan aturan kerja yang mewajibkan usaha dilakukan secara berkelompok. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya apakah masih layak diberi bantuan secara kelompok ataukah lebih baik langsung secara perorangan saja.

#### 2. Efisiensi

Tahapan pelaksanaan program yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu:

- a. Penjajagan dan sosialisasi setelah didapat data *By Name By Address (BNBA)* dan usulan usaha dari calon penerima program KUBE yang penyusunan proposal dan verifikasi datanya dilakukan oleh pendamping sosial.
- b. Pengusulan jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh sebuah kelompok dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang. Jenis usaha adalah usaha yang sudah dijalankan karena program KUBE adalah program yang membantu pengembangan usaha.
- c. Pendamping sosial adalah penanggung jawab kegiatan yang bertempat tinggal di lokasi penerima bantuan, dalam hal ini pendamping sosial adalah warga Kecamatan yang sama dengan lokasi penerima bantuan.

#### 3. Kecukupan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap anggota KUBE tidak terlalu mempermasalahkan tentang nilai dana yang diberikan, mereka lebih fokus kepada dapat terbelinya peralatan kerja yang lebih memadai. Pemilihan jenis barang yang akan dibeli merupakan hasil musyawarah antara anggota kelompok bersama dengan pendamping sosial yang membantu penyusunan proposal dan Rencana Anggaran Belanja, sehingga dapat dipastikan bahwa peralatan yang dibeli merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh penerima manfaat.

#### 4. Pemerataan

Pendistribusian dana dengan cara transfer langsung ke nomor rekening kelompok yang didaftarkan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dan hanya dapat dilakukan penarikan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok yang sesuai dengan Surat Keputusan serta didampingi oleh Pendamping Sosial. Pembelanjaan barang kebutuhan KUBE dilakukan sesuai dengan usulan pada proposal pengajuan, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap anggota kelompok dengan dengan nilai yang sama rata untuk setiap individunya. Proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri mengakibatkan sulitnya mengetahui apakah keuntungan yang didapat setiap anggota adalah sama.

#### 5. Responsivitas

Bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan setiap anggota KUBE, dana yang didapat digunakan untuk membeli peralatan usaha sesuai dengan kebutuhan setiap anggota KUBE. Terjadinya peningkatan pendapatan dan dukungan pemerintah yang memberikan bantuan sosial terpadu juga cukup membantu setiap anggota KUBE dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Bantuan sosial terpadu yang dimaksud adalah Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan.

6. Ketepatan

Sasaran pelaksanaan program yang menitikberatkan kepada mereka yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (Siks-Ing) merupakan salah satu bentuk tepatnya tujuan pelaksanaan program yaitu pengentasan kemiskinan. Keterlibatan pendamping sosial dalam kegiatan verifikasi dan koordinasi dengan pihak Desa merupakan unsur penting lainnya yang terlaksana. Informasi lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa terjadi peningkatan pendapatan setiap anggota KUBE setelah mengerjakan usahanya dapat disimpulkan bahwa program KUBE ini memberikan dampak yang positif sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Dampak negatif dari pelaksanaan program ini adalah tidak tercapainya tujuan untuk meningkatkan kemampuan gotong royong yang merupakan aspek penting dalam program KUBE.

Penulis pada penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun taraf kehidupan penerima program KUBE belum sepenuhnya sejahtera, namun terjadi peningkatan pendapatan dan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik karena dilakukan sendiri bukan secara kelompok. Konflik antar anggota kelompok tidak ditemukan karena kegiatan usaha secara mandiri sudah menjadi keputusan bersama. Tujuan lain yang ingin meningkatkan kemampuan bermusyawarah dan gotong royong tidak dapat dicapai karena sudah tidak dilaksanakan sejak awal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan evaluasi dengan menggunakan kriteria William. N. Dunn didapatkan hasil sebagai berikut: kriteria efektifitas, tercapainya tujuan untuk meningkatkan pendapatan sudah dapat terlaksana, prinsip gotong royong adalah pokok permasalahan yang tidak dapat dilaksanakan; kriteria efisiensi, seluruh tahapan proses pelaksanaan program KUBE sudah dilaksanakan sesuai rencana. Selama prosesnya permasalahan yang cukup terlihat adalah program KUBE dilaksanakan secara mandiri bukan secara kelompok; kriteria kecukupan, dana bantuan program KUBE dibelanjakan peralatan kerja sesuai dengan profesi, kebutuhan kerja, dan usulan setiap anggota kelompok; perataan, dana yang sudah masuk sudah terdistribusi dengan tepat; responsivitas, dapat diandalkan karena mampu meningkatkan pendapatan anggotanya; ketepatan, bantuan digunakan untuk membeli peralatan kerja yang lebih layak sehingga memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya motivasi kerja dan pendapatan penerima manfaat. Permasalahan yang dihadapi dalam terlaksananya program KUBE di wilayah pesisir ini adalah penolakan dari penerima manfaat untuk menjalankan usahanya secara berkelompok.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada Allah subhanallahu wa ta'ala berkat ridho-Nya peneliti mampu mengerjakan penelitian dengan lancar. Selanjutnya kepada Dosen Pembimbing peneliti yang sudah meluangkan waktu, informasi, dan juga referensi bagi tersusunnya tulisan ini. Dinas Sosial Kotawaringin Timur yang telah memberikan izin dan informasi penting demi tersusunnya tulisan EVALUASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (Studi Kasus Pada Desa Serambut dan Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut) ini. Serang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengevaluasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Narasumber penelitian yang ada di Desa Serambut dan Desa Bapinang Hilir Laut yang sudah bersedia untuk bercerita tentang program yang sudah diterima.

## REFERENSI

- Ananda, R dan Rafida, T. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Paulu, Normawati I., Amaliah, Tri Handayani., Lukum, Amir. 2022. Pengaruh Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*. 5 (1):175-182.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Yanti, Ni Nyoman Kartika. 2022. Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. *Widyanata*. 19 (2):67-75.
- Yuniarti., Abdiyah, Lathifah., Nurjanah, Siti., Siregar, Septi Lastri., dan Riani, Puput. 2021. Penelitian Evaluatif Dalam Pendidikan. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*. 1(1); 73-87.